

Pengaruh Belanja Modal dan Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi NTB Dimoderasi Realisasi Anggaran

Fitri ^{1*}, Ikrawati ², Wahyu Hasdi ³, Muhammad Ikram S ⁴, Nurfadilah ⁵

^{1*,2,3,4,5} Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia.

Email: 2204040003@uinpalopo.ac.id ^{1*}, 2204040009@uinpalopo.ac.id ², 2204040005@uinpalopo.ac.id ³, muhammadikrams@uinpalopo.ac.id ⁴, nurfadilah@uinpalopo.ac.id ⁵

Histori Artikel:

Dikirim 28 November 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 Desember 2025; Diterima 20 Januari 2026; Diterbitkan 1 Februari 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Fitri, F., Ikrawati, I., Hasdi, W., S, M. I., & Nurfadilah, N. (2026). Pengaruh Belanja Modal dan Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi NTB Dimoderasi Realisasi Anggaran. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(1), 801-810. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i1.5994>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta menguji peran realisasi anggaran sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data panel delapan kabupaten/kota di NTB selama periode 2020–2024. Analisis data dilakukan menggunakan regresi berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan. Realisasi anggaran tidak mampu memoderasi pengaruh belanja modal, namun terbukti memperkuat pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penggunaan belanja modal masih perlu ditingkatkan, sementara pengelolaan belanja pegawai yang lebih produktif dapat memberikan kontribusi nyata terhadap aktivitas ekonomi daerah. Selain itu, realisasi anggaran yang optimal menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan pengujian variabel makro lainnya pada penelitian selanjutnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan pertumbuhan ekonomi di NTB.

Kata Kunci: Belanja Modal; Belanja Pegawai; Pertumbuhan Ekonomi; Realisasi Anggaran; MRA; NTB.

Abstract

This study aims to analyze the influence of capital expenditure and employee expenditure on regional economic growth in the Province of West Nusa Tenggara (NTB) and to examine the role of budget realization as a moderating variable. The research employs a quantitative method using panel data from eight districts/municipalities in NTB for the period 2020–2024. Data analysis was conducted using multiple regression and Moderated Regression Analysis (MRA) to test the interaction between the independent variables and the moderating variable. The results indicate that capital expenditure has no significant effect on economic growth, whereas employee expenditure shows a positive and significant effect. Budget realization does not moderate the influence of capital expenditure but is proven to strengthen the effect of employee expenditure on regional economic growth. These findings suggest that the effectiveness of capital expenditure utilization still needs improvement, while more productive management of employee expenditure can contribute significantly to regional economic activity. In addition, optimal budget realization serves as an important factor in supporting sustainable economic growth. This study recommends incorporating additional macroeconomic variables in future research to obtain a more comprehensive understanding of the determinants of economic growth in NTB.

Keyword: Capital Expenditure; Employee Expenditure; Economic Growth; Budget Realization; MRA; NTB.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang (Muhammad Habibullah Aminy Muhamad Sayuti and Hidayat 2023). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan aktivitas ekonomi menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan berbagai faktor produksi (Gosal, Lopian, and Masloman 2022). Namun, meskipun menjadi indikator fundamental pembangunan, pencapaian pertumbuhan ekonomi belum merata antar daerah. Fenomena tersebut terlihat jelas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang pada tahun 2023 hanya mampu mencatat pertumbuhan sebesar 1,80%, jauh di bawah rata-rata nasional 5,05%. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi karena pemerintah daerah setiap tahunnya mengalokasikan belanja publik yang cukup besar, terutama belanja modal dan belanja pegawai melalui APBD. Secara teoritis, belanja pegawai seharusnya meningkatkan kinerja birokrasi dan kualitas layanan publik, sedangkan belanja modal diarahkan untuk memperkuat infrastruktur, kapasitas produksi, serta aktivitas ekonomi daerah. Namun kenyataannya, tingginya alokasi belanja tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi NTB secara optimal, sehingga memunculkan research problem mengenai efektivitas belanja daerah. Di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti arus investasi dan perdagangan internasional, tetapi juga oleh kebijakan fiskal dan kualitas pengeluaran pemerintah daerah (Luluk Fadliyanti, Surtika Yanti, and Abdul Manan 2021). Belanja modal memiliki fungsi strategis dalam menciptakan infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat meningkatkan produktivitas, sedangkan belanja pegawai berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat (Defitri 2020). Namun, besarnya alokasi anggaran tidak menjamin dampak ekonomi yang maksimal apabila realisasi anggaran tidak berjalan efektif.

Realisasi anggaran merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program yang telah direncanakan. Rendahnya realisasi dapat mencerminkan lemahnya perencanaan, proses birokrasi yang lambat, atau kendala pelaksanaan program (A Gede Wertianti and Dwirandra 2013). Sebaliknya, realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan sehingga potensi dampaknya terhadap perekonomian daerah lebih besar. Karena itu, realisasi anggaran dipandang sebagai variabel yang dapat memoderasi hubungan antara belanja publik dan pertumbuhan ekonomi (Setyowati 2023). terutama dalam konteks efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal. Melihat kondisi tersebut, penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana belanja modal dan belanja pegawai memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB, serta apakah realisasi anggaran mampu memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut (Mahmudi 2021). Beberapa penelitian terbaru juga menekankan bahwa kualitas eksekusi anggaran memiliki peran kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah (Akselerasi *et al.* 2024). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan memperjelas fenomena ketidaksesuaian antara besarnya belanja pemerintah daerah dan rendahnya pertumbuhan ekonomi NTB, sekaligus menganalisis peran realisasi anggaran sebagai variabel moderasi (Halim and Abdullah 2022).

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menghasilkan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Perkembangan ekonomi mengukur prestasi dari pertumbuhannya selama periode waktu tertentu. Dengan peningkatan faktor produksi dalam jumlah dan kualitas, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. (Rahmatullah, Amang, and Zakaria 2022)

2.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang mencakup seluruh anggaran negara untuk membeli, membangun, atau memperbaiki aset tetap berwujud, seperti infrastruktur, gedung, dan peralatan, yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan selama lebih dari satu periode akuntansi (Hasani and Abstract: 2022). Investasi dalam belanja modal berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, karena dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas layanan publik, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan alokasi anggaran yang tepat untuk belanja modal, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang menarik investasi swasta, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya (Edira and Hermanto 2023). Oleh karena itu, belanja modal bukan hanya sekadar pengeluaran, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. bahwa NTB tetap mengalami pertumbuhan ekonomi yang lemah memunculkan pertanyaan besar.

2.3 Belanja Pegawai

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN, belanja pegawai merupakan belanja yang ditanggung oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membayar pegawai, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara, serta pejabat negara, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Belanja ini mencakup kompensasi atas pekerjaan yang telah diselesaikan, kecuali untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal (Rofiq and Arza 2021). Belanja pegawai merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas aparatur sipil negara sebagai bagian dari dukungan terhadap operasional pemerintahan. Pengeluaran ini dipandang memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, sebab belanja pegawai yang dikelola secara efisien dapat meningkatkan motivasi serta produktivitas aparatur, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, belanja pegawai memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Treza Tampubolon and Ariadi 2023).

2.4 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran adalah pengalokasian anggaran yang telah dilakukan dan telah dilaksanakan. Perlu dibuat laporan tentang realisasi anggaran dan pertanggung jawaban yang menunjukkan kegiatan yang telah dilakukan setiap tahun. Realisasi anggaran harus sesuai dengan realisasi sebelumnya dan saldonya harus nol (Yuniarti 2022). Realisasi anggaran merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi anggaran yang telah direncanakan. Meskipun alokasi belanja modal dan belanja pegawai dalam APBD cukup besar, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan optimal jika anggaran tersebut tidak direalisasikan dengan baik (A Gede Wertianti and Dwirandra 2013). Rendahnya realisasi dapat mengindikasikan masalah dalam perencanaan, efisiensi birokrasi, atau lemahnya kapasitas pelaksanaan program, yang semuanya dapat melemahkan efek belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tingginya realisasi menunjukkan bahwa anggaran tidak hanya direncanakan, tetapi benar-benar dijalankan, sehingga potensi dampaknya terhadap perekonomian daerah lebih besar. Oleh karena itu, realisasi anggaran berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi (Setyowati 2023).

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan pada proses deduktif-induktif. Proses penelitian dimulai dengan penyusunan kerangka teori, pendapat para ahli, dan pengetahuan peneliti berdasarkan pengalaman, yang kemudian dirumuskan menjadi masalah penelitian

RESEARCH ARTICLE

beserta alternatif pemecahannya. Selanjutnya, rumusan masalah tersebut diuji atau dievaluasi melalui pembuktian menggunakan data empiris yang dikumpulkan di lapangan (Sugiyono, 2020). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini. Oleh karena itu, sampel yang digunakan terdiri dari 10 kabupaten dan kota di NTB selama periode 2021–2024. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS for Windows. Proses analisis data melibatkan serangkaian prosedur untuk mengolah, menguji, dan menginterpretasikan data sesuai dengan tujuan penelitian.

Tahap pertama dalam analisis data adalah uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal, di mana data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel independen dalam model regresi, dengan nilai VIF yang kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah model regresi menunjukkan ketidaksamaan varians residual antar pengamatan, dengan menggunakan uji Glejser dan tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model regresi dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis, digunakan Moderated Regression Analysis (MRA), yang merupakan bentuk khusus dari regresi linear berganda yang memasukkan variabel interaksi, yaitu hasil perkalian antara dua atau lebih variabel independen, ke dalam persamaan regresi. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi uji t kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selain itu, uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai sejauh mana model dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, dengan nilai adjusted R-squared yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen mampu menyediakan informasi yang kuat untuk memprediksi variabel dependen.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Tabel 1. hasil uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	6,57987991
Most Extreme Differences	Absolute	0,089
	Positive	0,088
	Negative	-0,089
Test Statistic		0,089
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi berdistribusi normal.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinerialitas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance		
	B	Std. Error						
1 (Constant)	12,322	4,190		2,941	0,006			
X1	-0,016	0,009	-0,276	-1,826	0,076	0,956	1,046	
X2	0,014	0,006	0,368	2,400	0,022	0,928	1,077	
Z	-0,902	0,846	-0,162	-1,066	0,294	0,946	1,057	

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh variabel menunjukkan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolineritas pada model regresi yang digunakan.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-9,976	22,055		-0,452	0,654
X1	-0,522	6,484	-0,014	-0,081	0,936
X2	4,085	7,784	0,095	0,525	0,603
Z	4,158	6,995	0,102	0,594	0,556

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.206 ^a	0,042	-0,040	7,47770	2,312

$$d = 2,312$$

$$dU = 1.658$$

$$4 - Du = 4 - = 2,342$$

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa nilai $dU < d < 4 - dU$, yaitu $1,658 < 2,312 < 2,342$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Sederhana

Model	Coefficients ^a			
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	10,347	3,765		2,748
Belanja Modal	-0,015	0,009	-0,261	0,092
Belanja Pegawai	0,015	0,006	0,400	0,012

- Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi variabel belanja modal sebesar 0,092 yang lebih tinggi dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Nilai signifikansi variabel belanja pegawai tercatat sebesar 0,012, yang lebih rendah dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 6. Hasil uji MRA

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	37,186	10,726		3,467	0,001
	Belanja Modal	-0,015	0,008	-0,262	-1,852	0,073
	Belanja Pegawai	-0,062	0,032	-1,664	-1,941	0,061
	Realisasi Anggaran	18,548	8,428	3,332	2,201	0,035
	X1.Z	-5,949E-08	0,000	-0,203	-1,388	0,174
	X2.Z	7,852E-07	0,000	4,444	2,364	0,024

- a) Nilai signifikansi pada variabel interaksi antara belanja modal (X1) dan realisasi anggaran (Z) sebesar 0,174, yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran tidak mampu memoderasi hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.
- b) Nilai signifikansi pada variabel interaksi antara belanja pegawai (X2) dan realisasi anggaran (Z) sebesar 0,024, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, realisasi anggaran terbukti mampu memoderasi pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 7. Hasil uji T

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	17,805	2,692		6,615	0,000
	Belanja Modal	-0,011	0,009	-0,185	-1,163	0,252

Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi untuk variabel Belanja Modal (X1) adalah 0,252, yang berada di atas ambang 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Tabel 8. Hasil Uji T

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	7,440	3,456		2,153	0,038
	Belanja Pegawai	0,013	0,006	0,350	2,306	0,027

Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi variabel Belanja Pegawai (X2) adalah 0,027, yang berada di bawah batas 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Belanja Pegawai (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Tabel 9. Hasil Uji R
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.434 ^a	0,188	0,145	6,86114

Diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,188, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 18,8%. Dengan kata lain, kontribusi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 18,8%.

4.2 Pembahasan

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga hipotesis pertama dinyatakan tidak diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah belum mampu memberikan dorongan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan hal ini antara lain, pertama, efektivitas pemanfaatan belanja modal yang masih belum optimal, seperti alokasi yang tidak diarahkan pada sektor-sektor strategis dengan nilai produktivitas tinggi. Kedua, belanja modal cenderung memberikan dampak ekonomi dalam jangka panjang, sehingga hasilnya mungkin belum sepenuhnya tercermin selama periode penelitian. Ketiga, karakteristik struktur ekonomi NTB yang didominasi sektor pertanian, pertambangan, dan pariwisata juga menjadi alasan mengapa belanja modal belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, faktor teknis seperti keterlambatan realisasi anggaran, perencanaan proyek yang kurang matang, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi juga menjadi kendala dalam optimalisasi dampak belanja modal. Hasil ini konsisten dengan penelitian Hasannudin *et al.* (2024) yang menemukan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang dan Putri Fidyah Majid *et al.* (2025) yang menunjukkan hasil serupa di Kabupaten Sidrap. Meskipun belanja modal diharapkan menjadi instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi, dalam konteks NTB, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan dampak yang nyata terhadap perekonomian daerah.

Sebaliknya, hasil uji t menunjukkan bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pegawai, yang mencakup gaji, tunjangan, dan pengeluaran rutin aparatur pemerintah, memberikan kontribusi nyata terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Pengaruh ini dapat dipahami melalui peran belanja pegawai sebagai bagian penting dari komponen konsumsi pemerintah yang secara langsung mendorong peningkatan daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini menjadi lebih relevan di wilayah dengan struktur ekonomi yang masih sangat dipengaruhi oleh pengeluaran sektor publik, sehingga belanja pegawai mampu memberikan stimulus signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Di NTB, yang sebagian besar wilayahnya masih tergolong daerah berkembang, belanja pegawai berperan sebagai motor penggerak utama aktivitas ekonomi lokal, khususnya melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan sektor jasa. Efek pengganda yang timbul dari belanja pegawai turut memperkuat permintaan agregat, sehingga berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Temuan ini konsisten dengan penelitian Sari dan Nugroho (2021) yang menunjukkan hubungan positif antara belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi di sejumlah provinsi di Indonesia, serta Yuliani (2020) yang menemukan bahwa belanja pegawai memberikan dorongan nyata terhadap kinerja perekonomian daerah. Namun, meskipun belanja pegawai terbukti signifikan, perlu diingat bahwa belanja ini bersifat non-produktif dan tidak langsung menciptakan aset ekonomi jangka panjang seperti belanja modal. Oleh karena itu, efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu dikaji lebih lanjut agar tidak membebani anggaran daerah di masa depan. Pengelolaan belanja pegawai yang efisien dan berbasis pada peningkatan kualitas layanan publik akan menjadi kunci untuk memastikan kontribusi positifnya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di NTB. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel interaksi antara belanja modal dan realisasi anggaran memiliki nilai signifikansi 0,174, yang lebih tinggi dari ambang batas signifikansi 0,05. Temuan ini menegaskan bahwa realisasi anggaran tidak mampu memoderasi hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Ini mengindikasikan bahwa tingkat realisasi anggaran, meskipun penting dalam pengelolaan fiskal daerah, tidak memiliki kemampuan untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa efisiensi, ketepatan pelaksanaan, atau kualitas realisasi anggaran belum cukup signifikan untuk mengubah dampak belanja modal. Meskipun anggaran belanja modal telah direalisasikan, efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat bergantung pada faktor-faktor lain, seperti kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran.

RESEARCH ARTICLE

Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri dan Wibowo (2021), yang menemukan bahwa tingkat realisasi anggaran tidak selalu mampu memoderasi hubungan antara belanja daerah dan kinerja pembangunan, terutama jika kualitas belanja tersebut rendah. Penelitian Arfan dan Salim (2022) juga menekankan bahwa keberhasilan belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran tersebut. Oleh karena itu, meskipun realisasi anggaran merupakan indikator penting dalam pengelolaan fiskal, perannya sebagai variabel moderator dalam hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Peningkatan efisiensi realisasi anggaran perlu diiringi dengan perbaikan pada kualitas dan ketepatan sasaran dari belanja modal itu sendiri agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa variabel interaksi antara belanja pegawai dan realisasi anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,024, yang lebih rendah dari batas signifikansi 0,05. Temuan ini menegaskan bahwa realisasi anggaran berperan sebagai variabel moderasi yang efektif dalam hubungan antara belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Artinya, tingkat realisasi anggaran dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja pegawai dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana anggaran tersebut direalisasikan secara optimal. Realisasi anggaran yang baik dapat meningkatkan daya serap belanja pegawai sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih nyata. Sebaliknya, jika realisasi anggaran kurang optimal, pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi dapat menjadi kurang efektif. Temuan ini sejalan dengan studi Rahman dan Sari (2022), yang menemukan bahwa realisasi anggaran berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam hubungan antara belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi di Indonesia. Studi tersebut menekankan pentingnya tidak hanya besaran anggaran, tetapi juga kualitas pelaksanaan dan ketepatan waktu realisasi anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat disarankan untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran, khususnya pada belanja pegawai, guna memastikan bahwa alokasi dana tersebut dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa belanja modal tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini berkaitan dengan efektivitas pemanfaatan belanja modal yang masih rendah serta struktur perekonomian daerah yang bergantung pada sektor-sektor tertentu, sehingga peningkatan anggaran belanja modal belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung. Sebaliknya, belanja pegawai terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat dan aktivitas konsumsi. Selain itu, realisasi anggaran tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, tetapi mampu memperkuat pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi penggunaan belanja daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan dengan hasil tersebut, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu meningkatkan efektivitas belanja modal dengan mengutamakan alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis yang memiliki potensi untuk memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Perencanaan yang lebih matang, pengawasan proyek yang ketat, serta pemilihan program yang tepat sasaran menjadi langkah penting untuk memaksimalkan manfaat belanja modal. Di sisi lain, pengelolaan belanja pegawai harus diarahkan agar lebih efisien dan berbasis peningkatan kualitas layanan publik, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian dapat berkelanjutan dan tidak hanya bersifat jangka pendek. Selain itu, peningkatan efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran, terutama pada belanja pegawai, menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak optimal terhadap perekonomian daerah. Untuk

RESEARCH ARTICLE

memperkaya pemahaman mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi di NTB, penelitian selanjutnya dianjurkan untuk menelusuri variabel lain yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi serta menilai dampak jangka panjang dari belanja modal dan belanja pegawai terhadap pembangunan daerah.

6. Referensi

- Akselerasi, Dampak, Belanja Terhadap, Pertumbuhan Ekonomi, & Ling, M. (2024). Dampak akselerasi belanja terhadap pertumbuhan ekonomi. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 125–140. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i2.884>.
- Aminy, M. H., Sayuti, M., & Hidayat, A. R. (2023). Analisis pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1), 30–45.
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 107–119. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>.
- Edira, R., & Hermanto, S. B. (2023). Pengaruh belanja pegawai, belanja modal, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah kota/kabupaten di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(1), 1–20.
- Fadliyanti, L., Yanti, S., & Manan, A. (2021). Pengaruh belanja modal, investasi PMDN dan investasi PMA terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi NTB. *Journal of Economics and Business*, 7(1), 18–39. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.67>.
- Gosal, J. S., Lopian, A. L. C. P., & Masloman, I. (2022). Pengaruh belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado tahun 2005-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 85–96.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2022). *Pengelolaan keuangan daerah: Teori dan praktik* (Revised Ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hartono, M., Herianto, M., & Yuliani, F. (2020). Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Hasani, M. N. (2022). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 209–220.
- Mahmudi. (2021). *Manajemen keuangan daerah* (3rd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Putra, N., Pratiwi, L. I., Al-sakinah, P. S., Eko, M. D., & Safari, T. (2024). Pengaruh PAD, TKDD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang. 6(2), 279–284.
- Rahmatullah, M., Amang, B., & Zakaria, J. (2022). Pengaruh belanja modal, tenaga kerja, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Global*, 2(2), 153–164.
- Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, status pemerintah daerah, jumlah penduduk, jumlah SKPD, belanja pegawai dan leverage terhadap

RESEARCH ARTICLE

kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 705–719.
<https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.414>.

Setyowati, L. (2023). Pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan pendapatan daerah dan dana alokasi terhadap belanja modal. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 4(1), 16–29.
<https://doi.org/10.56696/jaka.v4i1.8259>.

Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (19th ed.). Bandung: Alfabeta.

Tampubolon, T., Lusyana, W., & Ariadi, W. (2023). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap pendapatan asli daerah pemerintah provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 25–31. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.151>.

Wertianti, A. G., & Dwirandra, I. G. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi pada belanja modal dengan PAD dan DAU sebagai variabel moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(3), 567–584.

Yuniarti, S. (2022). Literature review: Realisasi anggaran dan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) di SMPIT Al-Izzah Kota Serang. *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 181–194. <https://doi.org/10.32478/leadership.v3i2.1007>.